



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 12 Maret 2021

Halaman: 2

MODAL UTAMA JALANKAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL

Pemkot Pertahankan WTP

12 Kali Berturut-turut

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya akhirnya mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga 12 kali berturut-turut. Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tersebut berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Yogya 2020.

Hasil audit atas LKPD Kota Yogya 2020 tersebut diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan DIY Jariyatna kepada Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, Rabu (10/3) lalu. "Ini hasil kerja keras Pemkot Yogya termasuk semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang saling bekerja sama sehingga bisa meraih WTP ke-12 berturut-turut," tandas Heroe.

Menurut Heroe, prestasi WTP tersebut merupakan modal utama dalam menjalankan pemerintahan yang akuntabel. Hal ini karena penyelenggaraan pemerintahan tidak lepas dari penggunaan anggaran. Oleh karena itu proses pelaporan atas keuangan yang digunakan pun harus sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga setiap rupiah yang digunakan wajib untuk dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Oleh karena itu, Heroe mengajak seluruh OPD dan komponen instansi untuk menjaga keberhasilan tersebut. Di samping itu juga tidak lentas berpuas diri demi mengejar prestasi, melainkan dijadikan motivasi dalam meningkatkan

kinerja agar kelak dapat terus dipertahankan. "Yang paling utama adalah bagaimana menjaga tanggung jawab dan komitmen untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini adalah hasil kinerja dari semua pihak, baik OPD maupun masyarakat Kota Yogya terhadap pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan pemerintah," urainya.

Hal senada dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa. Ia berharap ke depan Pemkot terus patuh dan taat pada aturan kepatutan sehingga apa yang direncanakan benar-benar mencerminkan tata pemerintahan yang baik dan bersih.

"Dengan begitu masyarakat yang akan merasakan dampaknya secara lang-

sung," katanya.

Sementara Kepala BPK RI Perwakilan DIY Jariyatna, menjelaskan opini WTP merupakan hasil seleksi secara ketat. Pasalnya BPK memiliki standar yang

digunakan dalam pemeriksaan keuangan yakni Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Selain itu pemberian opini WTP tersebut merupakan bentuk apresiasi dari BPK

- | Instansi |
|----------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |

atas hasil pemeriksaan laporan keuangan. Ia menambahkan opini WTP juga harus disertai de-

ngan tingkat kesejahteraan rakyat. "Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan indikator kesejah-

teraan masyarakat dalam mengimplementasi keuangan daerahnya masing-masing," pesannya. (Dhi)-f

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
☐ Untuk Diketahui
☐ Jumpa Pers

Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005